

## Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Zulkifli Djamin<sup>1</sup>, Farid Wadjudi<sup>2\*</sup>, Desi Puspita<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Aprin, Indonesia  
Email: <sup>1</sup>zulkifli.djamin@gmail.com, <sup>2\*</sup>faridwadjudi@pasca.stie-aprin.ac.id,  
<sup>3</sup>nasadesipuspita@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana perimbangan, pendapatan asli daerah, pendapatan daerah dan belanja modal baik secara parsial maupun simultan terhadap kinerja keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014 – 2020 yang memiliki ketersediaan data sehubungan dengan variabel penelitian sebanyak 12 OPD. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi linier berganda dengan uji hipotesis menggunakan uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten OKI. Variabel Pendapatan Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten OKI. Variabel Belanja Modal berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten OKI. Variabel Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten OKI. Variabel paling dominan dari ke empat variabel bebas adalah variabel Pendapatan Daerah sebesar 0,835 atau sebesar 83,5%.

**Kata Kunci:** Dana Perimbangan, PAD, Pendapatan Daerah, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Daerah

### 1. PENGANTAR

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja didalamnya. Fungsi dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Pengukuran kinerja digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja dapat menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli

daerah, rasio aktivitas, *debt service coverage ratio* dan rasio pertumbuhan (Halim, 2016). Kinerja keuangan ini sangat penting karena dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang, menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, memonitor dan mengevaluasi kinerja, membantu menungkapkan dan memecahkan masalah yang ada. Terselenggaranya *Good Governance* merupakan salah satu persyaratan bagi pemerintah dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerahnya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Penerimaan dana perimbangan juga mencerminkan kemampuan keuangan dari suatu daerah untuk mengelola keuangan daerah tersebut. Tingginya ketergantungan daerah dengan dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat atau semakin besarnya dana perimbangan yang diperoleh maka kemampuan keuangan daerah tersebut untuk menggali potensi dari daerahnya sendiri semakin rendah dan kemandirian keuangan juga akan rendah sehingga mengindikasikan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut juga rendah (Putri, 2019).

Faktor lainnya yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana daerah. Menggenjot belanja modal adalah perkara sangat penting karena meningkatkan produktivitas perekonomian. Semakin banyak belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Belanja modal berupa infrastruktur jelas berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Belanja modal pemerintahan daerah akan menambah aset yang dimiliki oleh pemerintahan daerah tersebut. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah.

Teori ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Asnidar, (2019) menunjukkan bahwa bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di Kota Langsa. Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,503 atau sebesar 50,3% variabel belanja modal memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan Kota Langsa, sedangkan sisanya sebesar 49,7% dipengaruhi variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Sama halnya dengan daerah-daerah lain di Indonesia, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan, juga ikut melaksanakan otonomi daerah dengan mengelola secara mandiri dan memanfaatkan sejumlah sumber daya yang dimilikinya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Adapun kondisi dana perimbangan, pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1.** Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir 2014 – 2020

Tahun	Keterangan			
	Dana Perimbangan	PAD	Pendapatan Daerah	Belanja Modal
2014	1.279.107.615. 047	145.590.658.0 57	1.577.431.308.2 18	444.998.104.4 69
2015	1.255.126.807. 195	110.225.039.8 90	1.653.377.720.7 92	474.153.706.8 14
2016	1.472.007.196. 948	108.992.378.4 85	1.851.704.684.1 33	560.990.403.5 27
2017	1.493.738.924. 948	222.961.997.7 24	1.991.285.527.6 34	473.963.601.8 92
2018	1.603.716.516. 140	235.946.143.2 59	2.098.388.798.4 99	302.186.496.0 05
2019	1.610.231.422. 459	195.401.652.9 78	2.275.102.657.0 72	626.423.290.2 61
2020	1.260.805.003. 310	168.781.771.3 20	2.243.104.528.6 42	608.893.907.3 68

Sumber: Ogan Komering Ilir dalam Angka, (2021).

Berdasarkan Tabel 1 di atas diketahui untuk dana perimbangan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2014 - 2020 mengalami flutuasi, nilai terendah dana perimbangan pada tahun 2015 sebesar Rp 1.255.126.807.195 dan tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp 1.610.231.422.459. Pendapatan asli daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir selama tahun 2014 – 2020 juga mengalami fluktuasi, dimana nilai terendah PAD pada tahun 2016 sebesar Rp 108.992.378.485 dan nilai tertinggi pada tahun 2018 sebesar Rp 235.946.143.259.

Berbagai research gap mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah diantaranya Putri, (2019), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PAD dan dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya perolehan PAD dan penerimaan dana perimbangan akan diikuti dengan penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri, (2019) menunjukkan bahwa dana perimbangan, dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian lain yang dilakukan Minarsih, (2015), yang

menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini berfokus pada kinerja keuangan daerah, mengingat pentingnya pengelolaan keuangan daerah dalam mempengaruhi perkembangan wilayah dan pencapaian target keuangan daerah tersebut. Pengukuran kinerja keuangan daerah harus dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi ekonomi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan partisipasi masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat mengurangi anggaran serta menurunkan tingkat kemiskinan di daerah. Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang memiliki karakteristik dan permasalahan spesifik terkait kinerja keuangannya. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi:

- a. Apakah dana perimbangan secara parsial mempengaruhi kinerja keuangan Kabupaten Ogan Komering Ilir?
- b. Apakah pendapatan asli daerah secara parsial mempengaruhi kinerja keuangan Kabupaten Ogan Komering Ilir?
- c. Apakah pendapatan daerah secara parsial mempengaruhi kinerja keuangan Kabupaten Ogan Komering Ilir?
- d. Apakah belanja modal secara parsial mempengaruhi kinerja keuangan Kabupaten Ogan Komering Ilir?
- e. Apakah dana perimbangan, pendapatan asli daerah, pendapatan daerah, dan belanja modal secara simultan mempengaruhi kinerja keuangan Kabupaten Ogan Komering Ilir?

## 2. TINJAUAN LITERATUR

### 2.1 Teori *Agency*

Konsep teori keagenan (*agency theory*) menurut Supriyono, (2018) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana principal memberi wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi principal dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Teori keagenan adalah pemberian wewenang oleh pemilik perusahaan (pemegang saham) kepada pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, jika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama untuk meningkatkan nilai perusahaan maka manajemen akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Dalam teori keagenan (*agency theory*) terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi, salah satu diantaranya adalah terjadinya asimetri informasi (*information asymmetry*). Asimetri informasi merupakan suatu kondisi dimana dalam hal ini pihak

pemerintah sebagai agen lebih banyak mengetahui kondisi internal perusahaan/instansi dibandingkan pihak principal (masyarakat). Bentuk pertanggungjawaban APBD atau pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah berupa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang kemudian laporan ini akan digunakan oleh masyarakat sebagai dasar untuk menilai kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan termasuk mengelola keuangan daerah.

## 2.2 Dana Perimbangan

Menurut Phaurela Arta dan Emy Iryanie ,(2018) dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Dina Lathifa, 2020).

## 2.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Putri, 2019). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indikator untuk menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangannya dapat dilihat dari PAD, jika rasio PAD semakin tinggi dibandingkan dengan jumlah pendapatan, maka tingkat kemandirian daerah juga semakin tinggi. PAD diharapkan mampu untuk membantu keuangan daerah (Dina Lathifa, 2020; Hermawan et al., 2023; Septiani et al., 2023.).

## 2.4 Pendapatan Daerah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan). Berdasarkan pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa pendapatan daerah yang dianggarkan

dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

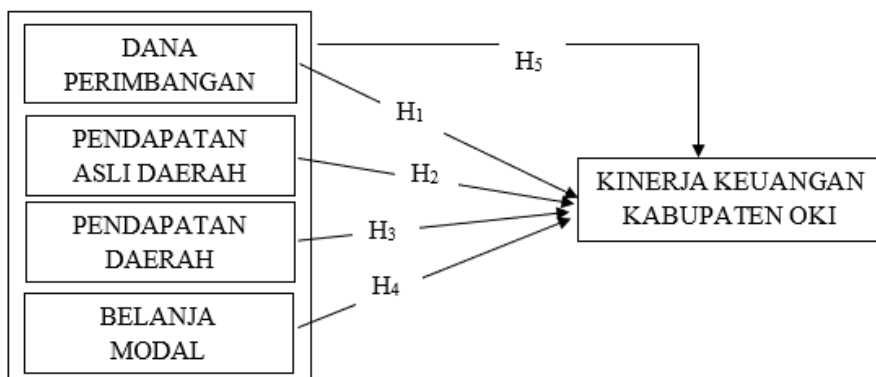
## 2.5 Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aktiva tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aktiva (PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan). Menurut Hidayat, (2017) belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang atau pembangunan aset tetap berwujud nilai manfaatnya lebih dari setahun dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program pemerintah daerah.

## 2.6 Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Putri, (2019) kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa kinerja adalah suatu keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Ukuran kinerja menjadi dua, yaitu ukuran kinerja keuangan dan ukuran kinerja non-keuangan. Kinerja keuangan biasanya diukur berdasarkan anggaran yang telah dibuat, yaitu dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Di pihak lain, kinerja non-keuangan dapat dilihat dari kualitas pelayanan, kedisiplinan, kepuasan pelanggan dan sebagainya. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu Hidayat, (2017):

- a. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah.
- b. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.



Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran

### 3. METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jl. Letjend Yusuf Singadekane No. 01 Kelurahan Jua Jua Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir 30618 Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan atau 1 semester yang dimulai dari bulan Agustus 2021 sampai Januari tahun 2022. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausalitas yaitu desain penelitian yang disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab-akibat antar variabel. Dalam penelitian ini terdapat variabel bebas (X) yaitu dana perimbangan, pendapatan asli daerah, pendapatan daerah dan belanja modal. Sedangkan variabel terikatnya yaitu kinerja keuangan daerah. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014 – 2020 yang memiliki ketersediaan data sehubungan dengan variabel penelitian sebanyak 12 OPD yang meliputi:

Tabel 2. Sampel Penelitian

No	Organisasi Perangkat Daerah
1.	Dinas Kesehatan
2.	Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kayuagung
3.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
4.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
5.	Badan Lingkungan Hidup
6.	Badan Perizinan dan Penanaman Modal
7.	Dinas Pemuda dan Olahraga
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
9.	Sekretariat Daerah

10.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
11.	Dinas Kelautan dan Perikanan
12.	Badan Pengelolaan Pasar dan Kebersihan

Sumber: BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir, (2021).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan menggunakan random sampling sebesar 20%. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa laporan keuangan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menggunakan tipe time series meliputi Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Kinerja Keuangan dari tahun 2014 sampai tahun 2020.

#### 4. HASIL DAN DISKUSI

##### 4.1 Hasil

##### a. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan Daerah pada penelitian ini di ukur dengan perbandingan pendapatan daerah dengan belanja daerah, bila surplus maka kinerja keuangan daerah di anggap baik begitupun sebaliknya. Rekapitulasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Periode 2014 – 2020 dapat disajikan pada Tabel 3 berikut:

**Tabel 3.** Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir 2014 – 2020

No	OPD	Tahun						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-
		90.9	98.5	149.	177.	134.	193.	183.
		16	33	785	370	153	656	115
2.	BLU RSUD Kayuagung	12.3	-	10.4	11.2	13.4	38.7	8.35
		16	1.92	12	27	81	27	4
			1					
3.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	-	-	-	-	-	-	-
		93.5	249.	323.	282.	230.	404.	363.
		47	960	907	597	082	813	490



4.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	- 4.34 6	- 7.55 5	- 9.45 5	- 5.03 9	- 8.58 8	- 14.6 31	- 13.6 99
5.	Badan Lingkungan Hidup	- 4.20 4	- 4.61 7	- 4.90 4	- 6.56 2	- 7.84 7	- 7.94 6	- 11.7 25
6.	Badan Perizinan dan Penanaman Modal	- 1.09 7	- 1.78 3	- 1.65 8	- -999	- 2.09 3	- 3.69 8	- -760
7.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	- 8.17 1	- 6.49 0	- 5.56 3	- 8.45 2	- 4.91 7	- 5.71 7	- 8.17 2
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	- 3.80 9	- 5.00 1	- 7.55 2	- 3.36 5	- 4.09 9	- 4.91 7	- 4.47 6
9.	Sekretariat Daerah	- 69.9 59	- 70.7 75	- 78.4 38	- 85.0 66	- 60.9 44	- 72.8 58	- 53.7 19
10.	DPPKAD	1.40 7.75 2	1.40 4.98 8	1.58 7.41 0	1.50 9.17 1	1.66 3.53 7	1.88 4.80 2	1.58 7.92 0
11.	Dinas Kelautan dan Perikanan	- 2.70 8	- 4.76 2	- 1.79 0	227	1.97 3	-250	1.07 4
12.	Badan Pengelolaan Pasar dan Kebersihan	- 6.36 3	- 9.39 5	- 8.99 8	- 4.87 5	- 9.13 9	- 9.13 8	- 9.28 8
<b>Jumlah</b>		1.13 4.94 3	944. 190	1.00 5.76 8	946. 297	1.21 7.12 5	1.20 5.89 9	948. 901
<b>Perkembangan</b>		-	16.8 1%	6.52 %	5.91 %	28.6 2%	0.92 %	21.3 1%

Sumber: BPKAD Kabupaten OKI, (2021).

Berdasarkan Tabel 3 diatas diketahui bahwa Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten OKI pada tahun 2014, 2015, 2016 dan 2019 dari 12 OPD hanya OPD BLU RSUD Kayuagung dan DPPKAD yang mengalami surplus sedangkan 10 OPD lainnya mengalami defisit. Kemudian pada tahun 2017, 2018 dan 2020 yang mengalami surplus yaitu BLU RSUD Kayuagung, Dinas Kelautan dan Perikanan serta DPPKAD sedangkan sisanya mengalami defisit. Kemudian dari segi perkembangan kinerja keuangan Daerah Kabupaten OKI terlihat bahwa terjadi

fluktuasi dimana perkembangan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 28,62% dan terendah pada tahun 2019 sebesar 0,92%.

### b. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian Dana Perimbangan

Dana Perimbangan dalam penelitian ini terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun dana perimbangan periode 2014 – 2020 dapat disajikan pada Tabel 4 berikut:

**Tabel 4.** Dana Perimbangan Kabupaten Ogan Komering Ilir 2014 – 2020

No	OPD	Tahun						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dinas Kesehatan	11.751	11	12.971	12.801	12.879	13.334	12.927
2.	BLU RSUD Kayuagung	24.580	22.347	28.610	28.493	30.880	44.472	24.493
3.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	26	15	37	42	28	26	81
4.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.631	1.799	2.101	422	401	386	268
5.	Badan Lingkungan Hidup	4	4	11	15	46	42	36
6.	Badan Perizinan dan Penanaman Modal	1.649	1.423	1.802	2.320	1.776	1.546	1.513
7.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	5	7	16	14	14	14	4
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	7	7	6	14	16	20	17
9.	Sekretariat Daerah	178	149	17	28	24	25	25
10.	DPPKAD	1.232.873	1.213.226	1.420.863	1.374.573	1.551.336	1.545.414	1.385.595
11.	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.813	4.327	5.174	4.574	5.819	4.492	6.203
12.	Badan Pengelolaan Pasar dan Kebersihan	583	464	393	399	491	454	351
<b>Jumlah</b>		1.279.105	1.255.125	1.472.005	1.423.702	1.603.715	1.610.231	1.431.518

<b>Perkembangan</b>	-	- 1,87 %	17,2 8%	- 3,28 %	12,6 4%	0,41 %	- 11,1 0
---------------------	---	----------------	------------	----------------	------------	-----------	----------------

Sumber: BPKAD Kabupaten OKI, (2021).

Berdasarkan Tabel 4 diketahui selama tahun 2014 sampai 2020 Dana Perimbangan yang tertinggi terdapat pada OPD DPPKAD sedangkan Dana Perimbangan terendah terdapat pada OPD Badan Lingkungan Hidup. Kemudian dari segi perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten OKI terlihat bahwa terjadi fluktuasi dimana perkembangan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 12,64% dan terendah pada tahun 2019 sebesar -11,10%.

**c. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian Pendapatan Daerah**

Dari data yang telah dikelola diketahui selama tahun 2014 sampai 2020 Pendapatan Daerah yang tertinggi terdapat pada OPD DPPKAD sedangkan Pendapatan Daerah terendah selama tahun 2014 dan 2015 terdapat pada OPD Badan Lingkungan Hidup, kemudian pada tahun 2016 – 2020 Pendapatan Daerah terendah terletak pada OPD Badan Kesehatan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Kemudian dari segi perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten OKI terlihat bahwa terjadi fluktuasi dimana perkembangan tertinggi pada tahun 2016 sebesar 19,71% dan terendah pada tahun 2020 sebesar -9,27%.

**d. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian Belanja Modal**

Dari data yang telah diolah diketahui selama tahun 2014 sampai 2020 Belanja Modal yang tertinggi terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga sedangkan Belanja Modal terendah selama tahun 2014 dan 2015 terdapat pada OPD Badan Perizinan dan Penanaman Modal, kemudian pada tahun 2016 – 2020 Belanja Modal terendah terletak pada OPD Badan Kesehatan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Kemudian dari segi perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten OKI terlihat bahwa terjadi fluktuasi dimana perkembangan tertinggi pada tahun 2016 sebesar 167,57% dan terendah pada tahun 2018 sebesar -23,06%.

**e. Analisis Uji Normalitas Data**

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan normalitas *Kolmogorov Smirnov* dengan hasil perhitungan sebagai berikut.

**Tabel 5.** *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		<b><i>Unstandardized Residual</i></b>
N		16
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>	,0000000

	<i>Std. Deviation</i>	18676,60645872
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	,179
	<i>Positive</i>	,179
	<i>Negative</i>	-,103
<i>Test Statistic</i>		,179
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,200 <sup>c</sup>
<i>a. Test distribution is Normal.</i>		
<i>b. Calculated from data.</i>		
<i>c. Lilliefors Significance Correction.</i>		

Sumber: Data diolah, (2024).

Berdasarkan Tabel 5 di atas terlihat nilai signifikansi sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa regresi memenuhi asumsi normalitas data.

**f. Analisis Regresi Linier Berganda**

Penelitian ini ingin melihat pengaruh antara variabel bebas meliputi Pendapatan Daerah (X<sub>1</sub>), PAD (X<sub>2</sub>), Dana Perimbangan (X<sub>3</sub>) dan Belanja Modal (X<sub>4</sub>) terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Y). Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 6. Coefficient<sup>s</sup>**

<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	<i>(Constant)</i>	-40555828188	11625550355		-3.489	.001
	X1_DanaPerimbangan	.063	.322	.050	.195	.846
	X2_PAD	1.185	1.003	.121	1.181	.241
	X3_PendapatanDaerah	.725	.246	.835	2.951	.004
	X4_BelanjaModal	-.580	.125	-.096	-4.656	.000
<i>a. Dependent Variable: Y_KinerjaKeuanganDaerah</i>						

Sumber: Data diolah, (2024).

Berdasarkan Tabwl 6, maka diperoleh persamaan garis regresi sebagai berikut:  
 $Y = -40.555.828.188,412 + 0,050 X_1 + 0,121 X_2 + 0,835 X_3 - 0,096 X_4$

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta (a) sebesar -40.555.828.188,412 yang berarti bahwa tanpa adanya Dana Perimbangan (X<sub>1</sub>), PAD (X<sub>2</sub>), Pendapatan Daerah (X<sub>3</sub>) dan

Belanja Modal ( $X_4$ ), maka Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten OKI dalam kondisi defisit atau -40.555.828.188,412 (bilangan konstanta).

- 2) Nilai koefisien regresi variabel Dana Perimbangan ( $X_1$ ) sebesar 0,050 yang berarti bahwa bila variabel Dana Perimbangan meningkat sebesar Rp 1 maka Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten OKI akan mengalami peningkatan sebesar Rp 0,050 dengan asumsi variabel lain dalam penelitian ini dianggap konstan begitupun sebaliknya.
- 3) Nilai koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah ( $X_2$ ) sebesar 0,121 yang berarti bahwa bila variabel Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar Rp 1 maka Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten OKI akan mengalami peningkatan sebesar 0,121 dengan asumsi variabel lain dalam penelitian ini dianggap konstan.
- 4) Nilai koefisien regresi variabel Pendapatan Daerah ( $X_3$ ) sebesar 0,835 yang berarti bahwa bila variabel Pendapatan Daerah meningkat sebesar Rp 1 maka Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten OKI juga akan meningkat sebesar Rp 0,835 dengan asumsi variabel lain dalam penelitian ini dianggap konstan.
- 5) Nilai koefisien regresi variabel Belanja Modal ( $X_4$ ) sebesar -0,096 yang berarti bahwa bila variabel Belanja Modal meningkat sebesar Rp 1 maka Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten OKI akan mengalami penurunan sebesar Rp 0,096 dengan asumsi variabel lain dalam penelitian ini dianggap konstan, begitupun sebaliknya.

## 4.2 Diskusi

### a. Pengaruh Dana Perimbangan ( $X_1$ ) Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten OKI ( $Y$ )

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai  $t$  hitung variabel Dana Perimbangan sebesar 0,195 lebih kecil dari  $t$  tabel ( $n - k - 1$ ) sebesar 1,96 dengan nilai signifikansi 0,846 lebih besar dari  $\alpha = 5\%$  yang berarti bahwa variabel Dana Perimbangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten OKI. Berdasarkan statistik deskriptif variabel Dana Perimbangan diketahui selama tahun 2014 sampai 2020 Dana Perimbangan yang tertinggi terdapat pada OPD DPPKAD sedangkan Dana Perimbangan terendah terdapat pada OPD Badan Lingkungan Hidup. Nilai koefisien regresi variabel Dana Perimbangan ( $X_1$ ) sebesar 0,050 yang berarti bahwa bila variabel Dana Perimbangan meningkat sebesar Rp 1 maka Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten OKI akan mengalami peningkatan sebesar Rp 0,050 dengan asumsi variabel lain dalam penelitian ini dianggap konstan begitupun sebaliknya.

Besarnya penerimaan Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dapat digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja sesuai urusan daerah. Namun, pada umumnya DAU digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi belanja rutin daerah yang tidak produktif dan tidak

berkaitan secara langsung terhadap peningkatan program kerja pemerintah daerah. Kemudian Dana Perimbangan lainnya yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), dimana DAK merupakan sumber pendapatan transfer dari pemerintah pusat kepada daerah tertentu yang bersifat *specific grant*, yang artinya DAK dialokasikan oleh pemerintah pusat yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat dalam membantu mendanai kegiatan khusus pemerintah daerah yang sesuai dengan tujuan nasional. Penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari DAK pada suatu periode digunakan pemerintah daerah untuk meningkatkan sarana dan prasarana fisik daerah yang sesuai dengan tujuan dari program kerja Kementerian yang terkait, maka DAK hanya dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi belanja dalam bidang yang telah ditentukan, seperti pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, air minum, sanitasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, sarana dan prasarana perdesaan, serta perdagangan.

Selanjutnya Dana Perimbangan berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil untuk melihat angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan penyerahan desentralisasi dari pusat kepada daerah. Besar kecilnya penerimaan dana perimbangan tidak mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten OKI. Hal ini dikarenakan ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten OKI terhadap dana perimbangan sangat rendah yang menjadikan Pemerintah Daerah Kabupaten OKI memiliki kewenangan dan kebebasan dalam hal penggunaan sumber pendapatan sehingga prinsip otonomi daerah telah tercapai, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten OKI tidak lagi bergantung sepenuhnya pada dana perimbangan.

## **b. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah ( $X_2$ ) Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten OKI (Y)**

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai  $t$  hitung variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 1.181 lebih kecil dari  $t$  tabel ( $n - k - 1$ ) sebesar 1,96 dengan nilai signifikansi 0,241 lebih besar dari  $\alpha = 5\%$  yang berarti bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten OKI. Berdasarkan deskriptif statistik diketahui selama tahun 2014 sampai 2020 Pendapatan Asli Daerah yang tertinggi terdapat pada OPD DPPKAD sedangkan Pendapatan Asli Daerah terendah selama tahun 2014 dan 2015 terdapat pada OPD Badan Lingkungan Hidup, kemudian pada tahun 2016 – 2020 Pendapatan Asli Daerah terendah terletak pada OPD Badan Kesehatan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Penelitian ini menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten OKI, artinya setiap perubahan variabel Pendapatan Asli Daerah, maka secara statistik tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten OKI. Hal

ini dikarenakan dalam jangka waktu beberapa tahun terakhir realisasi pencapaian PAD Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan yaitu dalam kategori tidak efektif.

**c. Pengaruh Pendapatan Daerah ( $X_3$ ) Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten OKI ( $Y$ )**

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai  $t$  hitung variabel Pendapatan Daerah sebesar 2.951 lebih besar dari  $t$  tabel ( $n - k - 1$ ) sebesar 1,96 dengan nilai signifikansi 0,004 lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  yang berarti bahwa variabel Pendapatan Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten OKI. Kemudian berdasarkan statistik deskriptif diketahui selama tahun 2014 sampai 2020 Pendapatan Daerah yang tertinggi terdapat pada OPD DPPKAD sedangkan Pendapatan Daerah terendah selama tahun 2014 dan 2015 terdapat pada OPD Badan Lingkungan Hidup, kemudian pada tahun 2016 – 2020 Pendapatan Daerah terendah terletak pada OPD Badan Kesehatan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

**d. Pengaruh Belanja Modal ( $X_4$ ) Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten OKI ( $Y$ )**

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai  $t$  hitung variabel Pendapatan Daerah sebesar 4,656 lebih besar dari  $t$  tabel ( $n - k - 1$ ) sebesar 2.01669 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti bahwa variabel Belanja Modal berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten OKI. Berdasarkan deskriptif statistik diketahui selama tahun 2014 sampai 2020 Belanja Modal yang tertinggi terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga sedangkan Belanja Modal terendah selama tahun 2014 dan 2015 terdapat pada OPD Badan Perizinan dan Penanaman Modal, kemudian pada tahun 2016 – 2020 Belanja Modal terendah terletak pada OPD Badan Kesehatan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Nilai koefisien regresi variabel Belanja Modal ( $X_4$ ) sebesar -0,096 yang berarti bahwa bila variabel Belanja Modal meningkat sebesar Rp 1 maka Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten OKI akan mengalami penurunan sebesar Rp 0,096 dengan asumsi variabel lain dalam penelitian ini dianggap konstan, begitupun sebaliknya.

**e. Pengaruh Dana Perimbangan ( $X_1$ ), Pendapatan Asli Daerah ( $X_2$ ), Pendapatan Daerah ( $X_3$ ), dan Belanja Modal ( $X_4$ ) secara simultan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten OKI ( $Y$ )**

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai  $F$  hitung sebesar 673,522 lebih besar dari lebih besar dari  $F$  tabel ( $n - k - 1$ ) sebesar 2.59 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti bahwa

variabel Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten OKI. Pengukuran kinerja digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja dapat menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, *debt service coverage ratio* dan rasio pertumbuhan (Halim, 2016: 150). Kinerja keuangan ini sangat penting karena dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang, menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, memonitor dan mengevaluasi kinerja, membantu menungkapkan dan memecahkan masalah yang ada. Terselenggaranya *Good Governance* merupakan salah satu persyaratan bagi pemerintah dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.

## **f. Pengaruh Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten OKI (Y)**

Nilai korelasi sebesar 0,985 yang berarti bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara variabel Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap variabel Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten OKI. Kemudian diperoleh nilai R square sebesar 0,971 yang berarti bahwa 97,1% variabel Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten OKI mampu diterangkan oleh variabel Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal. Sedangkan sisanya sebesar 2,9% diterangkan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Pengaruh yang paling dominan dari ke empat variabel bebas adalah variabel Pendapatan Daerah sebesar 0,835 atau sebesar 83,5%.

## **5. KESIMPULAN**

Variabel Dana Perimbangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten OKI. Hal ini dikarenakan ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten OKI terhadap dana perimbangan sangat rendah yang menjadikan Pemerintah Daerah Kabupaten OKI memiliki kewenangan dan kebebasan dalam hal penggunaan sumber pendapatan sehingga prinsip otonomi daerah telah tercapai, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten OKI tidak lagi bergantung sepenuhnya pada dana perimbangan. Variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten OKI. Hal ini dikarenakan dalam jangka waktu beberapa tahun terakhir realisasi pencapaian PAD Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan yaitu dalam kategori tidak efektif. Hasil lainnya adalah sebagai berikut:



- a. Variabel Pendapatan Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten OKI.
- b. Variabel Belanja Modal berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten OKI.
- c. Variabel Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten OKI.
- d. Variabel paling dominan dari ke empat variabel bebas adalah variabel Pendapatan Daerah sebesar 0,835 atau sebesar 83,5%.

Implikasi penelitian ini, pertama, sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten OKI menerapkan strategi intensifikasi maupun ekstensifikasi guna meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD yang sekaligus dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Kedua, pemerintah Daerah Kabupaten OKI sebaiknya mengalokasikan dana perimbangan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah pada sektor produktif dan prioritas nasional, agar dapat meningkatkan pembangunan daerah dan sarana-prasarana daerah yang nantinya dapat menunjang peningkatan PAD. Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, dikarenakan masih terdapat banyak faktor-faktor lain yang berpengaruh di luar model penelitian, diharapkan peneliti dapat meneliti dengan menggunakan variabel-variabel lain di luar variabel penelitian ini seperti pembiayaan daerah, sumber daya manusia dan kondisi makro ekonomi.

## **REFERENSI**

Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Provinsi/Wilayah Kalimantan dan Sulawesi). Proceeding Sendi\_U. Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu.

Asnidar (2019). Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol. 3, No. 1, April 2019

Dina Lathifa, 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana

Distian Andi Hermawan, M., Septiani, D., & APRIN Palembang, S. (2023). Pengaruh Non-Performing Loan (Npl) Dan Operational Efficiency Ratio (Bopo) Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Kasus Pt Bank Jago Tbk Tahun 2017-2021). *Majalah Ilmiah Manajemen* ISSN, 12, 2089–2330. <https://doi.org/10.58437/mim.v11i2>

Halim. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Edisi 2 Salemba Empat: Jakarta

Hidayat (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi

- Jawa Timur Tahun 2010-2015. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.15, No.01 Juni 2017
- Minarsih, R. A. (2015). Pengaruh Size, Wealth, Leverage Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah
- Phaurela Arta dan Emy Iryanie (2018). Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Banjarmasin. Prosiding Seminar Nasional. Universitas Bakrie. Indocompac
- PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
- PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Putri. Pengaruh PAD dan dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. E-Jurnal Manajemen 2019. ISSN: 2302-8912. Vol. 8, No. 5, 2019. Hal: 2834 – 2861
- Septiani, D., Kisa, B. A., Nozylianty, N., & Liana, W. (2023.). The differences in the company's financial performance before and after the acquisition.
- Supriyono, R.A. 2018. Akuntansi Keperilakuan. Yogyakarta: UGM Press
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah